

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. KONSEP KEPALA KELUARGA TNI

a. Kepala Keluarga

Keluarga merupakan lembaga terkecil dari sebuah masyarakat, laki-laki dan perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga, maka dari itu keluarga tidak akan lepas dari unsur-unsur pembentukannya. Tidak dapat dipungkiri sebuah keluarga membutuhkan seorang pemimpin atau kepala keluarga demi terciptanya visi misi yang akan diraih. Keluarga adalah tempat dimana pembentukan sebuah karakter atau kepribadian terbentuk dan membentuk kondisi masyarakat yang berbudaya dan beradab.

Pada era modern ini, konsep kepala keluarga mengalami pergeseran makna, disebabkan oleh kondisi dari masyarakat yang pada kenyataannya menyatakan bahwa seorang laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga kini tidak sedikit peran tersebut digantikan perannya oleh perempuan yang rela mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kepala keluarga merupakan pemimpin atas keluarga yang dipimpinnya. Dalam hal ini, biasanya laki-laki yang berperan menjadi kepala keluarga, suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Kepala keluarga memiliki sebuah

keistimewaan selaku pemimpin didalam rumah tangga. Pendidikan yang ada didalam sebuah rumah pertama kali diberikan oleh keluarga dan menjadi sebuah tanggung jawab penuh yang ditugaskan kepada kepala keluarga atau yang biasa disebut bapak. Kepala keluarga menanamkan pendidikan dengan memberikan sebuah pengajaran dan menanamkan kepada istri dan anak-anaknya untuk beriman kepada Tuhan-nya.

Kepala keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga. Kepala keluarga ialah orang yang menangani segala urusan yang ada di dalam rumah tangga termasuk memberi nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan masyarakat dan lain-lain termasuk kehidupan sosial.

Suami yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan istri dan keluarganya dari segala sesuatu yang akan terjadi serta berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan bersikap yang adil.

Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang berperan penting dalam mendefinisikan sesuatu, yang memiliki posisi dan pengaruh dominan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang dan ruang untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Itu sebabnya "setiap pemimpin membutuhkan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan".

Kepemimpinan rumah tangga adalah tindakan atau kemampuan seorang ayah untuk memimpin keluarga yang terdiri dari istri dan anak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, ayah berkewajiban untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya.

Dengan adanya kepemimpinan kepala keluarga yang baik maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan serta sikap istri dan anaknya. Dengan adanya dorongan dari kepala keluarga pada keluarganya maka secara tidak langsung hal tersebut akan mampu membantu tumbuhnya rasa segan, menghormati dan respon baik dari anggota keluarganya.

b. TNI

Samuel P. Huntington (dalam Sunarto, 2016:77) membedakan tipe militer menjadi 2, yaitu militer profesional dan tentara praetorian. Disamping itu, masih terdapat tipemiliter menurut Amos perlmutter (dalam Sunarto, 2016:77) yaitu tipe tentara professional revolusioner.

Tentara Nasional Indonesia terbentuk ketika negara Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari penjajah, seperti Belanda yang berambisi menjajah Indonesia. Mulanya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian diubah menjadi

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan dibentuk lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk memperbaiki struktur sesuai pangkalan militer internasional.

Kemudian upaya pemerintah untuk menyempurnakan langkah selanjutnya dalam pembangunan tentara ini terus berlanjut, berjuang dan memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi disetujui oleh Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 untuk menyatukan dua angkatan bersenjata, tiga angkatan bersenjata sebagai tentara reguler dan organisasi perjuangan rakyat.

Pada tahun (1945-1949) saat perang kemerdekaan, Tentara Nasional Indonesia sukses diwujudkan menjadi Tentara Rakyat, Tentara Revolusioner dan Tentara Nasional. Selain menjadi kekuatan baru, Tentara Nasional Indonesia juga menghadapi beraneka ragam tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun Tidak hanya itu, Tentara Nasional Indonesia juga menghadapi ancaman politik dan militer. Intervensi politik datang dari kelompok komunis yang ingin membawa Tentara Nasional Indonesia di bawah dampak mereka melalui Biro Perjuangan & Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, tantangan domestik yang berdimensi militer adalah Tentara Nasional Indonesia menghadapi kerusuhan bersenjata dalam sejumlah lokasi, dan pemberontakan PKI dalam Madiun yang sanggup mengancam keutuhan negara dan Darul Islam

(DI) dalam Jawa Barat. Tantangan yang berasal dari luar negeri, Tentara Nasional Indonesia sudah dua kali menghadapi serangan militer Belanda yg memiliki organisasi & persenjataan yg lebih modern.

Tentara Nasional Indonesia menyadari keterbatasan menanggapi serangan Belanda, masyarakat Indonesia melancarkan Perang Rakyat Dunia, mengerahkan Tentara Nasional Indonesia berserta kekuatan publik dan sumber daya nasional guna menghadapi serangan. Oleh karena itu, keutuhan dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta warga bisa bertahan melalui kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia Serikat (RIS) beridi atas keputusan Meja Bundar (KMB), pada tahun 1949. Oleh karena itu, terbentuklah angkatan Bersenjata RIS (APRIS) yg adalah campuran antara Tentara Nasional Indonesia & KNIL sebagai pondasi utama. Pada bulan Agustus 1950, Indonesia balik sebagai negara kesatuan saat dibubarkannya RIS. APRIS juga berubah nama sebagai Tentara Nasional Indonesia (APRI).

Pemerintah menganut sistem demokrasi parlementer tahun 1950-1959 yang ditandai dengan lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Insiden 17 Oktober 1952 terjalin dikarenakan terdapat campur tangan politik yang menyangkut urusan internal Tentara Nasional Indonesia yang mengakibatkan keretakan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia AD. hegemoni ini mendorong Tentara Nasional Indonesia untuk terlibat pada aktivitas politik guna menciptakan

partai politik yakni Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebagai calon pada pemilihan presiden tahun 1955.

Upaya menyatukan Tentara Nasional Indonesia & Polisi Republik Indonesia pada organisasi ABRI tahun 1962 adalah elemen krusial berdasarkan sejarah Tentara Nasional Indonesia tahun 1960-an. Ketika angkatan bersenjata bersatu satu komando, diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya tidak gampang tergoyahkan oleh kepentingan segelintir kelompok besar menggunakan nilai-nilai tertentu. Sayangnya, banyak tantangan yang harus di hadapi, salah satu yang utama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) pada kerangka komunisme internasional. . Militer menggunakan pengaruh dari Presiden ataupun Pemimpin ABRI guna kebutuhan dan urusan politik-nya sendiri melalui infiltrasi & pembangunan.

Upaya PKI semakin tegang dan berujung dalam perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan absah G30S/PKI, meninggalkan negara Indonesia pada waktu itu dalam posisi yang sangat berbahaya. Dikondisi tersebut, TNI mengatasi situasi pasca perebutan kekuasaan dan menghancurkan kekuatan pendukungnya serta kekuatan warga & bahkan semua warga Indonesia. Dalam situasi kacau balau ini, ABRI menjalankan kegunaannya sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan politik sosial. Sebagai sarana pertahanan dan keamanan, ABRI menumpas pemberontak PKI dan lainnya. ABRI mendorong

terciptanya tatanan politik baru guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 selaku kekuatan politik.

Sesuai UU No. 34 Tahun 2004, Fungsi dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (dahulu ABRI) berubah. Tentara Nasional Indonesia berfungsi menjadi indera negara pada bidang pertahanan dan menjalankan tugasnya menurut kebijakan nasional dan keputusan politik. Sebagai indera pertahanan negara, kiprah Tentara Nasional Indonesia adalah: menangkal aneka macam bentuk ancaman militer dan bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara, baik didalam maupun luar negeri.

Tugas utama Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, dan sekaligus melindungi segenap bangsa. Semua pertumpahan darah di negeri ini dan Indonesia ditujukan untuk melawan ancaman dan agresinya terhadap bangsa dan keutuhannya.

Pada waktu yang sama, dalam reformasi internal, selalu melakukan reformasi internal sesuai dengan persyaratan reformasi negara. Tentara Nasional Indonesia akan terus berupaya guna mempertahankan reformasi internal untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan Indonesia yang baru dan lebih baik pada masa depan dan terus mempertahankan negara

kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pembela negara, Tentara Nasional Indonesia berkomitmen untuk melakukan reformasi internal TNI sejalan dengan kebutuhan reformasi dan keputusan kebijakan negara.

c. Kepala Keluarga TNI

Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu tempat, hidup bersama dan merasakan hubungan batin sedemikian rupa sehingga timbul rasa saling mempengaruhi dan perhatian (Solaeman 200:16). Karena pada dasarnya keluarga adalah komunitas dalam satu atap dan menimbulkan rasa bahagia yang dialami dengan hidup bersama dan “berbagi” suka dan duka sesama, karena keluarga merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun, tiap keluarga memiliki aturan dan pola asuh yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Masih banyak orang tua yang salah dalam mendidik anaknya, cenderung otoriter terhadap anaknya, tanpa memberikan kehangatan. Orang tua menggunakan kekuasaan, kendali dan aturan yang ditetapkan untuk memaksa anak menuruti apapun yang dikatakan orang tua, baik atau buruk. Secara abstrak, dalam kehidupan profesi sebagai tentara yaitu penerapan pola komunikasi dan didikan kepada anggota keluarga sangat tegas dan disiplin dari mulai hal kecil sampai hal besar. Penerapan disiplin ini merupakan hal yang sangat penting, mengapa penting? supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan terarah. Namun seringkali penerapan disiplin ini meleset bahkan berujung pada “kematian” karena kepala keluarga terlalu

mengekan anggota keluarganya. Ketika seorang anak diperlakukan seperti ini, anak merasa dibatasi, kebebasannya untuk melakukan sesuatu bahkan seringkali tidak merasa disayangi oleh orang tuanya.

Pola komunikasi dan disiplin biasanya dipengaruhi oleh orang tua yang pada dasarnya adalah tentara yang otoriter karena pelatihan mereka dalam disiplin dan kepemimpinan, dan faktor karakter bawaan dari keluarga yang identik bahkan keturunan. keluarga militer. Sikap berwibawa dan militer terlihat ketika berkomunikasi dengan keluarga, terutama kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan sebuah pola komunikasi terdapa setiap anggota keluarga. Karena kendala yang paling dirasakan oleh istri dan anak-anak adalah bagaimana komunikasi dengan kepala keluarga apabila sikap dan perilakunya dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya sangat otoriter karena merasa dirinya sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga berhak untuk berkuasa sepenuhnya dan melakukan apa saja bahkan menyuruh atau memberikan pengaruh apa saja sesuai keinginannya. Persoalan mengenai bagaimana untuk mengantur tanggung jawab sebagai kepala keluarga sering kali menjadi sebuah dilema dalam keluarga atas tindakan dan perlakuan yang dilakukan sebagai kepala keluarga. Terjadinya sebuah hubungan antara penyampaian pesan dengan penerima pesan

disebabkan oleh komunikasi yang berlangsung. Baik tidaknya sebuah pola komunikasi dapat terlihat dari kualitas pesan yang disampaikan.

Kedudukan seorang ayah maupun suami bukan hanya sebagai pemimpin keluarga, namun juga mengendalikan rumah tangga agar setiap anggota keluarga merasakan arti dari makna keluarga dan dapat secara terus-menerus meningkatkan kualitas pribadinya dalam berbagi segi. Seringkali orang tua terutama kepala keluarga memberikan pengaruh yang cukup memengaruhi istri dan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu atau memilih sesuatu yang menurutnya baik, tanpa meminta pendapat dari anggota keluarga terlebih dahulu.

Kepala keluarga yang di latar belakangin oleh perkejaan sebagai tentara nasional Indonesia kebanyakan dalam menjalankan hubungan kekeluargaan ataupun rumah tangga mereka bersifat otoriter, ada juga yang khalayak kepala keluarga seperti biasanya. Disini penulis akan sedikit membahas mengenai kepala keluarga TNI yang selalu mencampur tangani urusan pilihan atau menentukan sesuatu hal yang memang mempengaruhi dan memiliki keuntungan terhadap profesinya sebagai TNI. Keotoriteran kepala keluarga TNI disini adalah dimana kepala keluarga menentukan pilihan politik terhadap anggota keluarga yang memiliki hak untuk memilih harus sesuai dengan keinginannya atau keinginan kepala keluarga yang berprofesi sebagai TNI, anggota keluarga kebanyakan di pengaruhi oleh kepala keluarga untuk memilih salah satu

pasangan calon presiden, anggota dpr, anggota dprd, bahkan sampai ke pemilihan bupati ataupun pemilihan walikota. Ketika mempengaruhi perilaku politik individu terdapat beberapa faktor. Pertama, Struktur kepribadian yang terdapat di setiap individu. Kedua, lingkungan sosial yang secara tidak langsung seperti terpengaruh oleh yang lainnya. Ketiga, lingkungan sosial yang langsung mempengaruhi.

Maka dari itu jika dilihat dalam undang-undang no. 34 pasal 39 ayat 2 Tentang TNI yaitu prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, hal ini sangat bertolak belakang dengan kasus yang sedang penulis teliti yaitu tidak adanya ke netralitasan prajurit tni dalam merencanakan pilihan politik nya yang digunakan oleh anggota keluarganya .

d. Indikator Kepala Keluarga TNI

Untuk mengukur Preferensi Kepala Keluarga TNI, tolak ukur yang bisa dipakai yakni antara lain:

Tabel 2.1

Indikator Preferensi Kepala Keluarga TNI

Variabel X	Indikator
Preferensi Kepala Keluarga TNI	Kepala keluarga aktif dalam mensosialisasikan politik kepada anggota keluarganya
	Kepala keluarga berkuasa dan menentukan atas pilihan anggota keluarga

	Kepala keluarga sebagai pedoman pilihan politik
--	---

2. Pemilu

Pemilihan umum, yang disingkat menjadi pemilihan umum, akrab menggunakan isu politik & perubahan kepemimpinan lantaran pemilihan umum, politik, dan perubahan kepemimpinan saling terkait satu sama lain. Pemilu digelar hanya sebagai urusan politik terkait masalah pergantian pemimpin. Pemilu adalah salah satu fondasi primer dari proses penempatan harapan rakyat untuk bangkit. Pemilu juga adalah sebuah mekanisme demokratis guna menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Sebagian masyarakat memahami bahwa pemilihan umum adalah prosedur yang paling pasti untuk pergantian kekuasaan dan sebuah demokrasi yang mutlak.

berdasarkan Ibnu Tricahyo (2009:6), Pemilihan Umum yaitu:

”Secara universal Pemilihan Umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan masyarakat yang bermaksud menciptakan pemerintahan yang sah untuk kepentingan masyarakat”.

Pengertian di atas mengartikan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk melaksanakan kedaulatan masyarakat, menciptakan pemerintahan adil, & mengekspresikan kehendak ataupun kepentingan masyarakat. Indonesia adalah Negara yang mengikutsertakan masyarakat negaranya pada konteks penyelenggaraan negara.

Kedaulatan masyarakat dilaksanakan legislator ataupun anggota dewan yang duduk dalam DPR melalui sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Rakyat umum memilih wakil masyarakat melalui pemilihan umum yang adil & teratur yang bertujuan memperjuangkan kehendak masyarakat.

Pemilu adalah mekanisme kerja sistem politik demokrasi, lantaran secara teoritis pemilu dipercaya menjadi langkah awal dalam aneka macam demokrasi konstitusional. Pemilihan umum sangat krusial bagi negara mana pun yang mendukung demokrasi. Sampai saat ini, pemilihan umum masih dipercaya menjadi peristiwa konstitusional yang krusial lantaran memenuhi persyaratan tertentu & merupakan pemilihan yang diikuti oleh semua lini masyarakat. Demikian pula, rakyat dapat mengekspresikan keinginannya buat menentang garis politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan.

Meskipun pemilihan umum adalah bentuk konkret dari demokrasi prosedural, pemilihan umum tidak sama dengan demokrasi, satu aspek terpenting berdasarkan demokrasi adalah pemilihan umum harus dilakukan secara demokratis. Maka dari itu, menganjurkan sebuah Negara untuk demokrasi, norma guna memilih pejabat dalam lembaga legislatif & eksekutif pada tingkat sentra & daerah.

Tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja diartikan menjadi cara pelaksanaan kedaulatan masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislative lainnya yang dilaksanakan secara Luber Jurdil. Selanjutnya prinsip-prinsip yang diterapkan pada

penyelenggaraan pemilihan generik, pada pemilihan presiden/wakil , maupun anggota legislatif, mengikuti prinsip yang sama yaitu:

- a. Langsung yaitu rakyat berhak menyalurkan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum yaitu rakyat berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan menjamin kesempatan untuk semua masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, golongan, daerah, pekerjaan, status sosial;
- c. Bebas yaitu rakyat berhak untuk bebas menentukan pilihannya tanpa ditekan, dipaksa oleh siapapun, sesuai dengan kepentingannya. ;
- d. Rahasia yaitu hak pilih rakyat, dijamin bahwa pilihannya dirahasiakan sehingga hak pilihnya tidak diketahui siapapun;
- e. Jujur yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik penyelenggara, peserta, pemilih, pemerintah dan pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Adil yaitu pada saat diadakan pemilihan umum, semua yang terlibat diperlakukan sama dan tidak dicurangi oleh pihak manapun.

Kedudukan lembaga penyelenggara pemilu ditegaskan dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan independen". Semua demokrasi modern menyelenggarakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu demokratis, karena pemilu

yang demokratis tidak hanya simbolis, Pemilu yang demokratis wajib kompetitif, periodik, meliputi (luas) dan wajib memilih arah pemerintahan.

Pemilihan umum dianggap penting dalam penyelenggaraan negara, paling tidak “ada dua keuntungan yang juga merupakan tujuan yang ingin dicapai ketika menyelenggarakan pemilihan, yakni terbentuknya suatu budaya kekuasaan yang sah (resmi) juga tercapainya fungsi pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Legitimasi politik, yaitu melalui pemilu, legitimasi pemerintahan yang berkuasa dapat diperkuat.
- b. Fungsi perwakilan politik yaitu melalui pemilihan umum, rakyat mencalonkan wakil-wakil yang dapat diandalkan untuk jabatan legislatif dan eksekutif.
- c. Pergantian elit penguasa, dalam arti pemilihan umum melibatkan sirkulasi elit, dipandang sebagai pemimpin yang melayani dan mewakili masyarakat.
- d. Lembaga pendidikan politik yaitu pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat dengan harapan masyarakat sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Oleh karena itu, pemilu ini bertujuan untuk mewujudkan transisi pemerintahan yang aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak asasi warga negara.

Secara umum, dalam legislatif Republik Demokratik Rakyat Korea dan Republik Rakyat Demokratik Korea, rakyat memiliki hak untuk memilih mereka

yang akan mewakili mereka di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk menjalankan fungsi legislatif, hukum, pengawasan dan fiskal. Dalam kekuasaan eksekutif presiden dan pemimpin daerah, rakyat memilih untuk mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemilihan umum. Kedua kekuasaan tersebut pada hakikatnya merupakan wakil rakyat dan mempunyai fungsi masing-masing, karena legitimasinya diperoleh langsung dari rakyat itu sendiri melalui pemilu. Status forum kedua instansi pemerintah tersebut sangat penting agar mereka dapat memilih gaya dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Sistem pemilu selalu didasarkan pada nilai-nilai tertentu dan memiliki sejumlah kelebihan maupun kekurangan. Pada kenyataannya, tidak ada sistem pemilihan yang ideal yang cocok untuk setiap negara, namun memiliki kesamaan, yaitu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilihan agar pemilihan memilih berlangsung secara legal dan demokratis. Di antara sekian banyak jenis, yang generik dikenal dan berkisar dalam sistem distrik dan sistem tarif. Sistem pemilihan disebut juga daerah pemilihan beranggota tunggal sedangkan sistem proporsional disebut daerah pemilihan beranggota banyak, artinya sejumlah wakil dipilih pada setia daerah pemilihan.

Sistem distrik adalah sistem berbasis sejarah yang paling tua dan berdasarkan pada unit geografis dikenal sebagai distrik. Dibagi menjadi distrik sebagai tujuan pemilihan pada suatu wilayah, dan jumlah perwakilan rakyat tergantung pada

jumlah distrik. Kandidat yang memperoleh suara paling banyak di daerah pemilihan adalah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap kalah dan tidak dihitung lagi. Sistem pemilihan distrik adalah Wilayah Negara dibagi menjadi daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang sama untuk diperebutkan Badan Perwakilan Rakyat, Setiap daerah pemilihan memilih seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang kandidat terpilih jika dia bisa mendapatkan suara terbanyak. di satu daerah pemilihan tidak bisa digabungkan dengan suara yang diperoleh di daerah pemilihan lain.

Proporsi atau representasi proporsional diperkenalkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi beberapa kelemahan sistem regional. Dalam sistem berimbang, jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai sebanding dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai tersebut. Untuk mengetahui jumlah situs yang diperoleh, dilakukan perbandingan.

Mekanisme sistem pemungutan suara proporsional secara umum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan alokasi kursi di daerah pemilihan (provinsi),
- b. Menentukan ukuran kuota untuk menentukan jumlah suara yang dibutuhkan partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen, Jumlah kuota ini tergantung dengan jumlah penduduk dan kursi dalam perselisihan.

Ada delapan kriteria utama pemilu yang demokratis, antara lain terdapat hak pilih yang universal (aktif dan pasif), Kesetaraan bobot suara, Kemungkinan untuk memilih calon dari latar belakang ideologi yang berbeda, Kebebasan memilih Orang menunjuk tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mampu mencapai kemakmuran dan keadilan, Persamaan hak untuk berkampanye, Kebebasan memilih, kejujuran dalam penghitungan suara dan organisasi berkala.

3. Partisipasi Politik

Pada awalnya partai berfokus pada partai politik sebagai aktor utama, seiring berjalannya demokrasi, banyak kelompok masyarakat yang ingin mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Konsep partisipasi politik juga terkait dengan interpretasi sosialisasi dan politik.

Partisipasi politik adalah proses di mana anggota masyarakat dapat berbagi pandangan atau pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan, seperti pengambilan keputusan dan kegiatan yang disponsori pemimpin masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

"Bergabung" berasal dari akar bahasa Latin "*parses*" (bagian) dan "*capere*" (tiba). Kita dapat menggunakan "ambil" sebagai sinonim. bergabung, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim untuk tindakan bergabung. Dalam pengertian ini, keterlibatan politik dapat didefinisikan sebagai tindakan terlibat atau mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di tingkat politik dan kegiatan politik suatu negara. Menurut George dan Achilles (Rohaniah dan Efriza 2015: 467) partisipasi

politik Dengan memberdayakan warga, bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Keterlibatan individu atau kelompok, direncanakan atau tidak direncanakan, semuanya dapat diterima. Memilih, mencalonkan diri, atau bergabung dengan partai politik adalah contoh warga negara yang terlibat dalam politik.

Dalam pandangan Ramlan Subakti, partisipasi politik seseorang ada dua kategori: partisipasi aktif dan pasif. Berikut ini adalah daftar contohnya;

- a) Partisipasi Aktif merupakan suatu aktivitas dari masyarakat dalam negeri dimana hal tersebut bertujuan dalam hal ikut pada sebuah penentuan kebijakan dalam pemilihan penyelenggara negara untuk kepentingan bersama.
- b) Partisipasi Pasif merupakan aktivitas sipil yang mendukung berfungsinya negara untuk menciptakan kesesuaian dengan tujuan. Jenis partisipasi meliputi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan penerapan kebijakan pemerintah.

Herbert McClosky (dalam Budiardjo. 2008: 367) mengemukakan Warga dapat mengambil bagian dalam proses pemilihan dan berbagai inisiatif kebijakan publik dengan cara ini, yang sepenuhnya terserah mereka. Menurut sumber yang sama (Arimbi, 1993: 17), partisipasi masyarakat merupakan proses komunikasi antara masyarakat yang merasakan pengaruh kebijakan dengan pemerintah yang membuat kebijakan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang yang luas dapat dijelaskan bahwasannya pada partisipasi politik ini memiliki makna yakni

dapat dijadikan suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kegiatan kepentingan sosial dan politik, seperti mampu memberikan pendapat dan menjadi bagian dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan.

Menurut Miriam Budiardjo (Cholisin 2007: 150), Partisipasi dalam politik dapat didefinisikan sebagai pemilihan pemimpin nasional dan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik oleh individu atau kelompok. Memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat pemegang saham, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, dan menandatangani kontrak dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen hanyalah beberapa opsi yang tersedia bagi Anda.

Adapun pengertian mengenai partisipasi politik berdasarkan pada pendapat para ahli yakni dibawah ini;

- a) Keith Fauls (1999: 133) menyatakan bahwa partisipasi politik ialah masyarakat yang aktif dalam proses pemerintahan maupun individu ataupun sebuah kelompok. Keterlibatan ini termasuk penentangan terhadap pemerintah serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1997: 3) Partisipasi politik ialah aktifitas masyarakat secara individu yang berarti pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Keterlibatan seseorang dapat bersifat pribadi atau publik,

direncanakan sebelumnya atau dadakan, tenang atau bergejolak, legal atau tidak sah, atau keduanya.

Partisipasi dalam politik dalam demokrasi berakar pada keyakinan bahwa kedaulatan nasional adalah milik dan melayani rakyat. Dengan bekerja sama, itu menetapkan tujuan dan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa warga negara adalah warga negara yang baik. Akibatnya, keterlibatan politik menjadi sarana masyarakat untuk menjalankan otoritas politik hukumnya. Mereka yang berpartisipasi dalam proses politik (seperti pemungutan suara atau kegiatan lainnya) merasa bahwa kepentingan mereka akan dipandu atau setidaknya diinformasikan oleh kegiatan ini, dan bahwa mereka dapat mempengaruhi tindakan pembuat keputusan melalui tindakan ini. Membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Akibatnya, mereka percaya bahwa tindakan mereka memiliki dampak politik yang substansial.

Keterlibatan politik dan kesadaran politik adalah konsep yang saling terkait. Orang-orang menuntut suara dalam administrasi pemerintah karena mereka menjadi semakin sadar bahwa mereka sedang diperintah. Mereka yang berpendidikan baik dan terhormat lebih mungkin memiliki wawasan ini. Partisipasi publik biasanya dianggap sebagai hal yang baik dalam masyarakat demokratis. Sementara keterlibatan minimal umumnya dipandang sebagai hal yang negatif, hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa banyak warga yang kurang tertarik pada isu-isu pemerintahan.

Menurut para ahli tersebut di atas, berpolitik adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Ini memiliki dampak yang signifikan pada siapa yang dipilih untuk melayani sebagai representasi rakyat dan bagaimana kebijakan pemerintah dirumuskan.

a. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Menurut jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin Faktor Psikologis, yaitu faktor yang berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua atau keluarga. selain itu membicarakan ketertarikan individu mengenai isu politik

Dua karakteristik utama yang mempengaruhi jumlah keterlibatan politik disebutkan oleh Ramlan Surbakti (1992:140). Yang pertama adalah kesadaran akan tempat seseorang di dunia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan inti dari kesadaran politik. Perlindungan politik, ekonomi, dan hukum hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis hak yang dimiliki orang. Tanggung jawab sipilnya sebagai anggota masyarakat dan anggota sistem politik juga memiliki dampak tingkat partisipasi politik. Faktor pertama sebenarnya tentang seberapa banyak pengalaman seseorang dengan masyarakat dan politik di sekitarnya.

Faktor kedua ialah tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasi pemerintah akan dinilai pada akhirnya dan diapresiasi. Penilaian ialah seperangkat keyakinan tentang apakah otoritas publik dapat dipercaya atau tidak dan terlepas dari apakah otoritas publik akan terpengaruh. Artinya, jika mereka melihat bahwa otoritas publik tidak dapat dipengaruhi dalam interaksi dinamis politik, dukungan dinamis mereka tidak akan ada habisnya.

Terlepas dari dua faktor di atas, ada faktor yang berbeda yang mempengaruhi kerjasama politik individu, seperti status sosial dan keuangan. Individu dengan situasi sosial tertentu, misalnya tempat atau posisi yang tinggi di mata publik, akan memiliki tingkat kepentingan politik yang lebih signifikan. Dengan cara yang sama, individu dengan status keuangan tinggi seringkali akan lebih dinamis dalam investasi politik. Variabel lain adalah asosiasi politik dan pengalaman hierarkis para wali.

Partisipasi politik wilayah lokal berfluktuasi dalam kekuatan dan struktur. Selain diidentikkan dengan kerangka politik, hal ini juga diidentikkan dengan perubahan sosial yang terjadi di arena publik. Seperti yang ditunjukkan oleh Weimer, ada lima hal yang bisa berdampak pada dukungan cakupan politik telah diperluas. Salah satunya adalah modernisasi, yang meliputi modernisasi dalam berbagai disiplin ilmu, komersialisasi hortikultura, industrialisasi, dan urbanisasi yang meluas, kecakapan yang diperluas, persekolahan yang diperluas, dan peningkatan komunikasi yang luas/media yang lebih luas. Kemajuan ini

termasuk asosiasi penduduk metropolitan baru, seperti buruh, pedagang dan ahli, dalam mempengaruhi pengaturan dan meminta mereka untuk mengambil bagian dalam menggunakan kekuatan politik sebagai pengingat bahwa individu memiliki kemampuan untuk membentuk nasibnya sendiri.

Pergeseran kelas sosial adalah faktor kedua yang perlu dipertimbangkan. Sebagai akibat dari industrialisasi dan modernisasi, telah terjadi peningkatan kelas menengah dan pekerja, yang menyebabkan pergeseran dalam keterlibatan politik. Partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh pengaruh intelektual dan kebangkitan media massa. Bangsa, liberalisme, dan egalitarianisme semuanya menganjurkan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Lebih mudah untuk mengirimkan ide kepada orang-orang dari semua lapisan masyarakat karena komunikasi yang luas. Keinginan masyarakat untuk didengar suaranya dalam membentuk kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh hal ini. Benturan ideologi politik adalah aspek terakhir yang harus dipertimbangkan.

Para ketua politik tersebut dimana saling berebut akan kekuasaan sering melakukannya dalam hal melakukan suatu pencarian bantuan mayoritas. Artinya, ujian kebebasan individu, sehingga perlawanan dan pertempuran kelas pekerja melawan hak istimewa yang memegang kekuasaan akan membangun suara individu. Variabel kelima adalah kerjasama pemerintah yang jauh dan luas dalam masalah persahabatan, keuangan dan sosial. Perluasan tingkat latihan pemerintah

ini secara teratur mendukung pengembangan latihan terkoordinasi untuk mengambil bagian dalam arah kemandirian politik.

Pemilih Dipengaruhi oleh faktor dalam (dari individu/individu) dan elemen luar (dari luar orang) ketika hanya memutuskan (memilih atau tidak). Blunt Lindenfeld (Maran, 2001:156) mengemukakan bahwasannya terdapat aspek yang paling penting dalam hal memberikan suatu dorongan pada individu untuk mengambil bagian dalam masalah pemerintahan adalah pemenuhan uang. Dalam ulasannya, Lindenfeld mengamati bahwa status moneter yang rendah membuat individu merasa ditolak Dunia politik. Milblas memiliki empat alasan utama mengapa dia ingin orang-orang terlibat dalam politik (Maran, 2001: 156) Pertama, individu perlu mengambil kepentingan dalam hidup karena dukungan. Yang kedua adalah akibat langsung dari kualitas individu itu sendiri. Ketiga, elemen sosial individu. Keempat, komponen keadaan politik atau iklim yang sebenarnya. Menurut Morris Rosenberg, mengapa seseorang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik;

- a) Pertama, disebabkan oleh kekhawatiran seseorang akan dampak buruk dari aktivitas politik..
- b) Kedua, bisa disebabkan oleh keyakinan bahwa partisipasi politik hanya buang waktu yang percuma.
- c) Ketiga, karena tidak adanya keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik

b. Bentuk Partisipasi Politik

Seperti yang ditunjukkan oleh Paige (dalam Cholisin, 2007: 153) Menyinggung perhatian politik dan kepercayaan pemerintah, kerangka politik dibagi menjadi empat jenis: kepentingan dinamis, dukungan terpisah dari yang dianiaya (apatis), kerjasama agresor revolusioner, dan investasi tidak aktif. Investasi dinamis ketika seorang individu memiliki Kesadaran politik dan kepercayaan pada pejabat publik menjadi prioritas utama. Dengan kata lain, selama masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah terhadap pejabat publik, maka investasi keuangannya dalam politik tidak akan tertekan (kurang perhatian). Dalam masyarakat di mana kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan publik pada otoritas rendah, kaum revolusioner lebih cenderung menyerang. Dengan asumsi bahwa kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pemerintah berlebihan, jenis dukungan ini dimungkinkan seharusnya bersifat laten.

Menurut Rush dan Althoff (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 93), bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dalam aktivitas politiknya masing-masing:

- a) *Votting* (pemberian suara).
- b) Mengikuti dalam suatu pembicaraan politik dengan secara bebas untuk mengikuti kepentingan umum .
- c) Ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah,

- d) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*),
- e) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*),
- f) Keanggotaan yang tidak berperan dalam suatu organisasi,
- g) Keanggotaan yang berperan dalam suatu organisasi,
- h) Mengejar jabatan politik atau administrasi.

Pemungutan suara adalah jenis partisipasi politik aktif yang paling populer di hampir setiap sistem politik yang demokratis dan otoriter, tetapi ada lebih banyak cara untuk terlibat dalam politik dalam skala yang lebih besar (Sitepu, 2012: 101). Politik bagi Gabriel Almond bersifat tradisional dan tidak ortodoks dalam pendekatannya.

a) Bentuk Konvensional :

- 1) *Votting*
- 2) *Group discussion*
- 3) *Campaign activities*
- 4) Membangun dan masuk pada kelompok kepentingan.
- 5) Berinteraksi dengan pejabat politik.

b) Bentuk Nonkonvensional :

- 1) Berdemonstrasi,
- 2) Konfrontasi,
- 3) Aksi mogok
- 4) Melakukan persuhan seperti perusakan fasilitas umum

- 5) Tindakan criminal politik seperti penculikan dan pembunuhan
- 6) Aksi perang griliya dan arus perubahan

Perilaku pemilih adalah keputusan masyarakat dengan mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat dalam menentukan pilihan atau diberikan kesempatan untuk memilih wakil atau pemerintahan yang sesuai dengan pilihannya melalui pemberiansuara. Maka hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Surbakti (2010) menjelaskan jika perilaku memilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Menurut Firmanzah (dalam Efrizal 2012:480) perilaku pemilih dapat diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam perilaku pemilih dapat dibedakan menjadi empat pendekatan yang digunakan yakni struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologi dan pendekatan pilihan rasional (Surbakti, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dengan beberapa pendekatan Menurut Ramlan Surbakti (2010: 46) yaitu :

- 1) Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan kelompok sosial mempunyai pengaruh penting dalam menentukan perilaku memilih. Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmu politik pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan mazhab clumbia. Sementara model makrososiologis menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkat atau lapisan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan sosiologis seperti agama, suku bangsa, kelas social (seperti pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan).
- 2) Pendekatan psikologis ialah ilmu pengetahuan alam di mana fungsi dan fenomena pikiran manusia diperiksa dan perilaku serta aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh kecerdasan individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek-aspek perilaku masyarakat umum, sehingga ilmu politik sangat erat kaitannya dengan psikologi (Sulhardi: 2008). Adapun menurut Efriza (2012) ada beberapa faktor psikologis yang mendorong pemilih mnentukan pilihannya yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikais partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predoposisi yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh prang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, ikatan perkawinan, dan situasi kritis.

- 3) Pendekatan rasional menjelaskan bahwa kegiatan pemilu dapat mempengaruhi tidak hanya hasil yang diharapkan tetapi juga perbedaan antara alternatif, sebagai biaya pemungutan suara dan perhitungan untung dan rugi, yang dianggap sebagai probabilitas pemungutan suara pilihan tersedia. Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil di harapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan prmilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih, sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk keputusan partai atau yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. Pendekatan rasional seperti kalkulasi untung rugi dan visi-misi.

c. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara. 2013:152) kegiatan partisipasi dibedakan menjadi 4 (empat) ;

- a) Kelompok apatis :individu yang tidak sama sekali tertarik dalam berpolitik..

- b) Spektator :individu yang hanya tertarik untuk menonton tidak ikut andil dalam kehidupan politik.
- c) Gladiator : individu yang ikut serta dalam tindakan politik menjadi pembicara politik, mengadakan perkumpulan dalam pembahasan politik dan aktivis politik.
- d) Pengkritik : individu yang menjadi penyokong suatu gagasan dimana tidak setuju karena tidak sepehaman.
- e) Para ilmuwan telah merumuskan pelbagai tipologi partisipasi politik. Berikut pandangan ilmuwan dari mancanegara dan Indonesia, tentang tipologi partisipasi politik.

Gambar 2.1
Piramida Politik



Gambar 2. 1

Dalam buku “*The Comparative Study of Politics*,”. Jenis piramida partisipasi. Frekuensi dan identitas jenis partisipasi ini dapat dipisahkan. Ketika radikalisme politik seseorang meningkat, demikian juga jumlah orang yang dipengaruhi. Pandangan piramida politik Ross dan Wilson mengungkapkan hal ini.

d. Indikator Partisipasi Politik

Dalam melakukan suatu partisipasi politik, maka indikator yang bisa dipakai yakni antara lain:

Tabel 2.2
Indikator Partisipasi Politik

Variable	Indikator
Perilaku pemilih	Ketaatan terhadap pilihan kepala keluarga
	Memilih atau tidak (Golput)
	Perubahan Hak Politik
	Pilihan terhadap visi/misi calon kandidat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis selama proses penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penulis mengacu pada berbagai bahan penelitian, yang memperkaya proses penelitian penulis. Berikut ini adalah jenis-jenis penelitian disertasi terdahulu yang digunakan oleh penulis untuk penelitiannya.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian
1	Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Asrama Ex Brigif 5)	Dhohan Wiranata	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui partisipasi politik anak Tentara Nasional Indonesia & faktor-faktor yg mensugesti partisipasi anak Tentara Nasional Indonesia.

2	PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PILIHAN POLITIK (Pilihan Presiden 2019 Di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar)	Ragil Tria Agustin	Metode Kuantitatif	Penelitian ini memakai metode kuantitatif memakai teknik multistage random sampling. Penelitian ini bertujuan guna menggali & menggambarkan bagaimana efek lingkungan tempat tinggal terhadap pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik dalam pemilihan presiden 2019 pada Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
---	--	---------------------------	---------------------------	---

3	Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Di Kabupaten Indramayu	Iim Soimah	Metode Kualitatif	Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan teknik multistage random sampling. Penelitian ini bertujuan guna menggali peran keluarga selaku agen pengenalan politik bagi pemilih pemula. Peneliti tidak hanya melihat dampak keluarga terhadap perilaku pemilih pemula, namun juga melihat bagaimana keluarga mensosialisasikan pemilih pemula.
---	--	------------	-------------------	--

Tabel 2.3

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menjelaskan sistematika penelitian ini. Dimana Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak kepala keluarga Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap perolehan suara anggota keluarga dalam pemilihan presiden 2019 Komplek Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dimana anggota TNI tidak diperbolehkan memilih dalam pemilu dan harus netral dalam semua pemilu. Namun, anggota keluarga TNI, yakni istri dan anak-anaknya, diperbolehkan ikut serta dan memilih dalam pemilihan umum.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran**Keterangan :**

Dalam kerangka refleksi di atas, dengan adanya preferensi keluarga terutama kepala keluarga (ayah) sebagai agen sosialisasi politik, sangat mempengaruhi pemberian hak pilih anggota keluarga. Karena kepala keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi politik dan perilaku politik yang baik dan dapat bertanggungjawab atas pilihannya.

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut telah dituangkan dalam

bentuk kalimat tanya. Dalam penelitian ini hipotesis yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

- H_a Terdapat Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga TNI Terhadap Pemberian Hak Pilih Dalam Pilpres 2019 Di Komplek Marinir Cilandak
- H_o Tidak Terdapat Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga TNI Terhadap Pemberian Hak Pilih Dalam Pilpres 2019 Di Komplek Marinir Cilandak